

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran surah An-Nisa/4:58.

- Abdullah, S., dan Nazry, R. (2015). “Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan.” *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 272–283.
- Akai, N. dan Sakata, M. (2002). “*Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth*” Evidence from State-level Cross-section Data for the United State. ” *Journal of Urban Economics*, Vol. 40, No 4: 987–1007.
- Alderfer, C. P. (1972). “*Existence, relatedness, and growth. Human needs in organizational settings*”. New York, NY, US. Free Press.
- Allen, Richard & Tommasi, Dannie. (2001). “*Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition Countries.*” Paris, France: OECD Publication Service.
- Andrian, Y., dan Samekto, A. (2017). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota di Pulau Jawa.” *Journal of Accounting Research and Review*, 10(2), 139–152.
- Ayem, S., dan Pratama, D. (2018). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016.” *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182.
- Bodman, P., Heaton, K.A., & Hodge, A. (2009). “*Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach.*” School of Economics, The University of Queensland, December, 1–10.
- Boediono. (2009). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi ketujuh. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Christover, A. P., & Rondonuwu, S. (2016). “Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak.” *Jurnal EMBA*, 4(1), 1241–1253.
- Davis, J. H. (1997). “*Toward A Stewardship Theory Of Management.* ” *Academy of Management Review*, 22(1), 20–4.
- Faridi, Muhammad Zahir. (2011). *Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan.* *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 31(1), 1-13.

- Felix, Olurankinse. (2012). “*Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria.*” *Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), pp: 1-6.
- Gujarati, Damodar N dan Porter, Dawn C. (2012). Dasar-dasar Ekonometrika. Bk 1 Ed 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2018. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25.” Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hairiyah, Malisan, L., dan Fakhroni, Z. (2017). “Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal,” *Journal FEB Unmul*, 14(2), 85–91.
- Handayani, S., Abdullah, S., dan Fahlevi, H. (2015). “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.” *Journal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(2), 45–50.
- Hartono, Jogyianto. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. Ed 6. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Jaeni, dan L Anggana, G. (2016). “Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Bantuan Provinsi Terhadap Belanja Modal.” *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 5(1), 13–26.
- Jaya, I. P., dan Dwirandra, A. A. N. B. (2014). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 79–92.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). “Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali.” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255–1281.
- Kusnandar, dan Siswantoro, D. (2012). “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.” *Journal Universitas Indonesia*, 1–20.
- Kusuma, H. (2016). “Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–11.
- Lestari, S. A. P. (2015). “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Daerah pada Pemerintahan Kota di Jawa Barat Tahun 2011-2013.” *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3383–3392.
- Malik, Shahnawaz, Mahmood-ul-hassan and Shahzad Hussain. (2006). “*Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan.*” *Department of*

Economics, Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan.

- Mamonto, S. Y., Kalangi, & D. Tolosang, K. (2014). "Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado*, 1–14.
- Meianto, E., Betri, & Wenny, C. D. (2014). 'Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *STIE Multi Data Palembang*, 1–13.
- Nazzaruddin, I., & Basuki, A. T. (2019). "Analisis Statistik dengan SPSS" (Edisi Pertama). Yogyakarta: Danisa Media.
- Nugraha, I. P., dan Dwirandra, A. A. N.B . (2016). "Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH pada Belanja Modal." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 284–311.
- Nurhidayati, L. L., & Yaya, R. (2013). "Alokasi belanja modal untuk pelayanan publik: praktik di pemerintah daerah." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 102–114.
- Nuryadin, D., dan Suharsih, S. (2017). "Analisis dan Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus terhadap Indikator Kinerja Pembangunan di Daerah, Studi Kasus Kabupaten-Kota 2003/2013." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 62–70.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nomor Per- 33 /pb/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Dan Belanja Modal.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- Putra, F. (2017). "Pengaruh desentralisasi fiskal, luas wilayah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian belanja modal." *Article Universitas Negeri Padang*, 1–25.
- Pratama, R. (2017). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi." *JOM Fekon*, 4(1), 2677–2689.
- Rachmawati, M. (2016). "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal." *Prodi Akuntansi UPY*.
- Rahmawati, R., dan Tjahjono, A. (2018). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di D.I Yogyakarta Tahun 2012 - 2016." *Jurnal Kajian Bisnis*, 26(2), 195–209.
- Ramlan, Abdullah, S., & Darwanis. (2016). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal." *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(2), 79–88.
- Rizani, F., Fatihah, N., Rasidah, Rawintan, dan Utami, A. (2011). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Daerah Pemerintah Kota di Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1), 19–27.
- Samekto, A. (2012). "The Impacts of Budget Decentralization on Economic Growth and Local Government Performance." *Journal of Economics, Business, and Accountancy / Ventura*, 15(1), 157–170.
- Sari, I., & Supadmi, N. L. (2016). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2409–2438.
- Sholikah, I., dan Wahyudin, A. (2014). "Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa." *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 553–562.
- Slyke, D. M. Van. (2006). *Agents or Stewards : Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship*, 157–187.
- Sudika, I., dan Budiartha, I. K. (2017). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1689–1718.

- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (1996). Pengantar Teori Makro Ekonomi. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2011). Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali Pers, Jakarta.
- Suparmoko. (2002). Ekonomi Publik (Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah), Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tambun, S. (2013). "Teknik Pengolahan Data dan Interpretasi Hasil Penelitian Dengan Menggunakan Program SPSS Untuk Variabel Moderating." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahyudi, Valencia, Maria dan Handayani, Nur (2015), "Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, DAK terhadap pengalokasian belanja modal", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(11).
- Wibisono, N., dan Wildaniati, A. (2016). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal." *Journal Ekomaks*, 5(2), 11–20.
- Widiasmara, A. (2019). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating." *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 45–56.
- Wong, J. (2004). "*The fiscal impact of economic growth and development on local government revenue capacity.*" *Journal of Public Budgeting Accounting Dan Finance Management*, 16(3), 413–423.
- Yudiaatmaja, F., Suwendra, W., dan Sukmawati, R. (2016). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.” *E-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 4, 1–9.

<https://www.bps.go.id/>

www.djpk.kemenkeu.go.id

<http://depdagri.go.id/>